



Penguatan Ekonomi Produktif dan Literasi Digital Masyarakat melalui KKN Berbasis Asset-Based Community Development (ABCD) di Desa Cimekar

Kresna Lutfiansyah, Annisa Aulia, Syafira Aulia, Sandi Irawan, Ade Hilman, Salma Nurzakia,
Khaterine Febriani, Ananda Salsabila, Indra Permana, Lisna Gianti
Universitas Al-Ghifari, Bandung, Indonesia
lutfiansyahkresna1@gmail.com

Abstrak

Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, memiliki aset ekonomi produktif berupa UMKM sablon, keripik pisang, gagang pacul, dan konveksi. Namun, pemanfaatan aset tersebut masih menghadapi keterbatasan pemasaran digital, khususnya pada UMKM Sablon Badjoe yang sebelumnya mengandalkan relasi pelanggan dan promosi dari mulut ke mulut. Kerentanan juga muncul pada aspek sosial digital, yaitu kebutuhan masyarakat untuk memperkuat kemampuan menyaring informasi, melindungi data pribadi, mengelola penggunaan gawai, serta mengenali risiko transaksi digital eksploitatif. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekonomi produktif dan ketahanan sosial digital masyarakat melalui KKN berbasis Asset-Based Community Development (ABCD). Metode dilaksanakan dengan pendekatan Living Lab melalui tahapan pemetaan aset kolektif, koordinasi dan ko-desain program bersama masyarakat, pendampingan, refleksi, serta evaluasi awal. Implementasi mencakup kunjungan dan pendampingan UMKM, optimalisasi Instagram, pembuatan website katalog Sablon Badjoe, serta program literasi digital "Saring Sebelum Sharing" yang terintegrasi dengan kegiatan sosial dan pendidikan masyarakat. Capaian intervensi berupa tersedianya kanal promosi digital dan website katalog sebagai media informasi serta pemesanan awal bagi UMKM mitra, disertai penguatan materi keamanan data, verifikasi informasi, pengasuhan digital, dan kewaspadaan terhadap desain antarmuka manipulatif. Hasil masih berupa luaran awal dan belum digunakan untuk mengklaim peningkatan pendapatan atau literasi secara statistik. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada pembentukan Program Desa Cimekar Tangguh Digital dan Produktif melalui Pojok UMKM Digital, Kelas Keluarga Tangguh Digital, dan pemantauan indikator agregat berbasis desa sebagai embrio actionable policy brief bagi Komdigi.

Kata kunci: ABCD; Digitalisasi UMKM; KKN; Ketahanan Sosial Digital; Literasi Digital.

Abstract

Cimekar Village, Cileunyi District, Bandung Regency, has productive economic assets in the form of screen printing, banana chips, hoe handles, and garment MSMEs. However, their utilization still faces digital marketing limitations, particularly Sablon Badjoe MSME, which previously relied on customer relationships and word-of-mouth promotion. Digital social challenges also arise, including the need to strengthen the community's ability to filter information, protect personal data, manage gadget use, and recognize risks in exploitative digital transactions. This activity aims to strengthen the productive economy and digital social resilience through a community service program based on Asset-Based Community Development (ABCD). The method used a Living Lab approach through collective asset mapping, community coordination and co-design, mentoring, reflection, and initial evaluation. Activities included MSME visits and assistance, Instagram optimization, development of a Sablon Badjoe catalog website, and the "Screen Before Sharing" digital literacy program integrated with community social and educational activities. The outputs included digital promotional channels and a catalog website as information and initial ordering media for the partner MSME, along with educational materials on data security, information verification, digital parenting, and awareness of manipulative interface designs. The results are preliminary outputs and do not claim statistically measured increases in income or literacy. Policy recommendations include establishing the Cimekar Resilient and Productive Digital Village Program through a Digital MSME Corner, Resilient Digital Family Classes, and village-based aggregate indicator monitoring.

Keywords: ABCD; MSME Digitalization; KKN; Digital Social Resilience; Digital Literacy.

1. Pendahuluan

Kemiskinan tidak hanya tercermin dalam keterbatasan pendapatan, tetapi juga dalam terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, pendidikan, informasi, peluang ekonomi, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan

sosial dan teknologi. Kerentanan tersebut perlu dipahami secara multidimensional karena rumah tangga dengan kapasitas ekonomi terbatas umumnya lebih mudah terdampak oleh keterbatasan akses pasar, informasi yang tidak memadai, serta risiko transaksi ekonomi yang merugikan. Dalam kerangka kebijakan nasional, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menegaskan optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui program yang tepat sasaran, terintegrasi, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Strategi yang ditekankan mencakup pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.peraturan.

Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, memiliki potensi sosial-ekonomi yang dapat menjadi basis penguatan kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat lokal, kegiatan KKN mengidentifikasi sejumlah usaha produktif di lingkungan RW 12, seperti usaha sablon, keripik pisang, produksi gagang pacul, dan konveksi. Akan tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas pemasaran dan akses pasar yang memadai. Pada UMKM Sablon Badjoe, misalnya, produk memiliki kualitas yang baik dan permintaan pesanan cukup tinggi, tetapi praktik pemasaran masih dominan bergantung pada relasi pribadi serta promosi dari mulut ke mulut. Usaha tersebut juga belum memiliki media digital yang memadai sebagai sarana promosi, katalog, maupun pemesanan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya defisit ekonomi produktif, yaitu keterbatasan dalam mengubah potensi usaha lokal menjadi sumber pendapatan yang lebih stabil, luas, dan berkelanjutan. Keterbatasan promosi, belum terbentuknya identitas digital usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan media digital berpotensi membatasi perluasan pasar dan daya saing UMKM. Dalam konteks mandat Inpres Nomor 8 Tahun 2025, penguatan kapasitas usaha produktif berbasis aset lokal menjadi relevan sebagai kontribusi pada strategi peningkatan pendapatan masyarakat. Pendampingan digitalisasi UMKM tidak dimaknai sebatas pembuatan akun media sosial atau katalog daring, melainkan sebagai upaya membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola promosi, informasi produk, dan relasi pelanggan secara lebih mandiri.

Namun, kerentanan masyarakat tidak berhenti pada dimensi ekonomi. Transformasi digital juga menghadirkan **kerentanan kognitif**, yaitu keterbatasan pengetahuan dan kecakapan masyarakat dalam mengakses, menilai, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi digital secara kritis dan aman. Defisit literasi digital dapat membuat pengguna lebih mudah menerima informasi yang tidak terverifikasi, melakukan penyebaran informasi secara tergesa-gesa, serta mengambil keputusan transaksi tanpa memahami risiko, syarat, biaya, maupun konsekuensi yang menyertainya. Hal ini menjadi penting mengingat aktivitas ekonomi dan komunikasi masyarakat semakin terhubung dengan media sosial, marketplace, layanan keuangan digital, serta beragam aplikasi berbasis internet.

Salah satu risiko yang menguat dalam ruang digital adalah paparan *dark patterns* atau arsitektur aplikasi manipulatif. Praktik ini dapat berupa penggunaan pesan urgensi yang menekan pengguna untuk segera bertransaksi, biaya tambahan yang baru muncul di tahap akhir pembayaran (*drip pricing*), manipulasi persetujuan, maupun klaim popularitas palsu. Studi pada konteks platform e-commerce dan teknologi finansial di Indonesia menunjukkan bahwa desain manipulatif dapat menurunkan kepercayaan pengguna, meningkatkan penyesalan setelah pengambilan keputusan, dan mendorong persetujuan yang tidak sepenuhnya disadari; pengguna dengan literasi digital rendah dilaporkan lebih rentan terhadap praktik tersebut. Risiko ini selanjutnya dapat disebut sebagai **Transaksi Digital Eksploitatif**, yaitu transaksi yang terjadi ketika keputusan pengguna dipengaruhi oleh desain antarmuka, informasi, atau mekanisme digital yang tidak transparan dan melemahkan otonomi konsumen.

Bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, transaksi digital eksploitatif dapat memperbesar risiko kerugian finansial, pembelian impulsif, pengeluaran yang tidak direncanakan, hingga paparan penipuan digital. Kerentanan tersebut berlawanan dengan tujuan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Karena itu, penguatan ekonomi produktif perlu berjalan bersamaan dengan penguatan **ketahanan sosial digital**, yakni kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara aman, kritis, produktif, dan bertanggung jawab. Ketahanan sosial digital mencakup kemampuan menyaring informasi sebelum membagikannya, memeriksa kredibilitas sumber, mengenali ciri penawaran yang manipulatif, menjaga data pribadi, serta mengambil keputusan transaksi berdasarkan kebutuhan dan informasi yang transparan.

Kegiatan KKN di Desa Cimekar dirancang dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), yaitu pendekatan pemberdayaan yang berangkat dari aset, keterampilan, jejaring, dan potensi yang telah dimiliki masyarakat. Program tidak hanya memosisikan masyarakat sebagai penerima intervensi, tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam pengenalan masalah, pemanfaatan aset lokal, dan keberlanjutan kegiatan. Implementasinya diwujudkan melalui penguatan ekonomi produktif UMKM Sablon Badjoe berupa optimalisasi pemasaran melalui

Instagram dan pembuatan website katalog, serta penguatan literasi digital melalui program “Saring Sebelum Sharing”.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan KKN berbasis ABCD dalam merespons dua bentuk kerentanan di Desa Cimekar, yaitu defisit ekonomi produktif dan defisit literasi digital. Artikel ini secara khusus menganalisis bagaimana pendampingan digitalisasi UMKM dapat mendukung perluasan peluang ekonomi masyarakat, sekaligus bagaimana edukasi literasi digital berkontribusi terhadap penguatan ketahanan sosial digital dan pencegahan risiko transaksi digital eksploitatif. Dengan pendekatan tersebut, program KKN diharapkan dapat mendukung agenda pengentasan kemiskinan secara lebih komprehensif: meningkatkan kapasitas pendapatan sekaligus melindungi masyarakat dari kerentanan baru di ruang digital.

2. Metode Penelitian

2.1. Metodologi Pendekatan Lapangan (Living Lab)

Kegiatan KKN ini menggunakan pendekatan lapangan *Living Lab* yang dipadukan dengan *Asset-Based Community Development* (ABCD). *Living Lab* diposisikan sebagai ruang belajar, pengujian, refleksi, dan perbaikan program secara kolaboratif di lingkungan nyata masyarakat Desa Cimekar, khususnya RW 12. Mahasiswa, perangkat desa, pelaku UMKM, kader posyandu, pendidik PAUD/madrasah, serta warga tidak ditempatkan sebagai objek penerima program, melainkan sebagai mitra yang terlibat dalam identifikasi aset, perumusan prioritas, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi hasil awal.

Pendekatan ABCD dipilih karena sesuai dengan karakter KKN yang berorientasi pada pemberdayaan dan keberlanjutan. Berbeda dengan pendekatan berbasis defisit yang berangkat terutama dari daftar masalah, ABCD memulai proses dari pengenalan kekuatan masyarakat: keterampilan individu, kegiatan ekonomi lokal, organisasi dan jejaring warga, fasilitas sosial, serta sumber daya lingkungan. Prinsip tersebut menempatkan setiap warga sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi dan menjadikan hubungan sosial sebagai modal penggerak perubahan.

Dengan demikian, keterbatasan pemasaran UMKM dan defisit literasi digital di Desa Cimekar tidak hanya dipahami sebagai persoalan, tetapi sebagai titik masuk untuk menggerakkan aset yang telah tersedia, seperti kualitas produk UMKM, relasi sosial warga, aktivitas pendidikan anak, kader kesehatan, serta dukungan pemerintahan desa.

2.2. Desain Living Lab Berbasis ABCD

Pendekatan lapangan dilaksanakan secara partisipatif dan iteratif dalam siklus: **pemetaan aset perumusan Bersama uji intervensi refleksi perbaikan**. Pada tahap pemetaan aset, mahasiswa melakukan penelusuran potensi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan digital melalui observasi lingkungan, komunikasi dengan perangkat dan warga, serta kunjungan pada unit usaha lokal. Hasil identifikasi memperlihatkan keberadaan UMKM Sablon Badjoe, usaha keripik pisang, produksi gagang pacul, dan konveksi; aktivitas posyandu; PAUD dan madrasah; serta praktik gotong royong warga sebagai modal sosial desa.

Tahap perumusan bersama dilakukan melalui pengenalan lokasi, pembukaan KKN bersama perangkat desa dan warga, pemaparan program kerja, serta koordinasi dengan pihak terkait. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa program tidak semata ditentukan dari luar komunitas, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, dan kemungkinan keberlanjutan pada tingkat lokal. Kesepakatan awal tersebut selanjutnya menjadi dasar pemilihan intervensi, yaitu pendampingan pemasaran digital UMKM melalui Instagram dan website katalog, edukasi “Saring Sebelum Sharing”, keterlibatan dalam pengajaran PAUD/madrasah, serta kegiatan pendukung kesehatan dan sosial.

Pada tahap uji intervensi, mahasiswa mendampingi UMKM Sablon Badjoe untuk membangun identitas digital melalui optimalisasi akun Instagram dan pembuatan website katalog. Uji ini diarahkan untuk melihat kelayakan penggunaan kanal digital sebagai media informasi produk dan pemesanan yang dapat dikelola secara bertahap oleh pelaku usaha. Bersamaan dengan itu, edukasi literasi digital dilaksanakan untuk membangun kebiasaan menyaring informasi, memeriksa sumber, menjaga data pribadi, serta mempertimbangkan risiko sebelum membagikan konten atau melakukan transaksi digital. Tahap refleksi dilakukan melalui diskusi dengan warga, pelaku usaha, dan dosen

pembimbing lapangan guna menghimpun umpan balik, mengidentifikasi hambatan penggunaan, dan menyusun penyesuaian program secara kontekstual.

2.3. Konversi 160 JKEM

Beban kegiatan dirancang dalam **160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)** selama satu bulan pelaksanaan KKN. JKEM dikonversi menjadi instrumen Living Lab melalui pembagian waktu yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada pengumpulan bukti lapangan, pembelajaran bersama masyarakat, evaluasi, dan penguatan keberlanjutan.

Komponen Living Lab		Aktivitas utama	Alokasi JKEM
Orientasi koordinasi	dan	Pengenalan wilayah, pembukaan, koordinasi perangkat desa, pemaparan program, dan penyusunan kesepakatan kerja	16 jam
Pemetaan kolektif	aset	Observasi lingkungan, kunjungan UMKM, identifikasi jejaring sosial, sarana pendidikan-kesehatan, dan potensi warga	32 jam
Baseline mapping	literacy	Observasi dan pengisian instrumen agregat terkait akses, penggunaan, keamanan, serta pengambilan keputusan digital	24 jam
Ko-desain program		Diskusi kebutuhan, penentuan fokus intervensi, penyusunan materi dan rencana pendampingan bersama mitra	16 jam
Uji ekonomi digital	intervensi	Pendampingan Instagram, penyusunan katalog dan website UMKM, dokumentasi produk, serta pelatihan pengelolaan dasar	32 jam
Uji ketahanan digital	intervensi sosial	Edukasi “Saring Sebelum Sharing”, pengenalan verifikasi informasi, perlindungan data pribadi, dan kehati-hatian transaksi	16 jam
Refleksi evaluasi	dan	Umpan balik mitra, observasi perubahan awal, evaluasi hambatan, serta perbaikan kegiatan	16 jam
Dokumentasi rencana keberlanjutan	dan	Penyusunan catatan kegiatan, serah-terima luaran, dan rekomendasi tindak lanjut bersama warga	8 jam
Total			160 jam

Alokasi tersebut adalah rancangan metodologis yang dapat disesuaikan dengan logbook JKEM resmi kampus. Agar dapat dipertanggungjawabkan dalam artikel, penulis perlu menyelaraskan tabel dengan catatan kehadiran, tanggal kegiatan, jumlah mahasiswa yang terlibat, durasi aktual setiap aktivitas, dan bukti dokumentasi lapangan. Jika 160 JKEM merupakan kewajiban **per mahasiswa**, artikel perlu menjelaskan bahwa perhitungan tersebut berlaku bagi setiap anggota; apabila merupakan total kelompok, istilahnya perlu diperjelas menjadi “total jam kerja efektif kelompok”.

2.4. Baseline Literacy Mapping

Pemetaan literasi digital awal (*baseline literacy mapping*) dirancang sebagai pengumpulan data **agregat dan non-diagnostik**. Tujuannya bukan memberi skor atau label kepada individu maupun menilai kemampuan warga secara personal, melainkan menggambarkan kecenderungan awal komunitas dalam mengakses, memahami, dan menggunakan ruang digital. Hasil pemetaan dipakai sebagai dasar penyesuaian materi edukasi serta evaluasi perubahan awal setelah pendampingan.

Instrumen pemetaan dapat disusun dalam format lembar observasi dan kuesioner singkat tanpa identitas pribadi. Variabel yang dihimpun meliputi:

Dimensi	Indikator agregat yang diamati
Akses digital	Kepemilikan atau akses bersama terhadap perangkat, koneksi internet, serta media digital yang paling sering digunakan
Kecakapan informasi	Kebiasaan memeriksa sumber, tanggal, konteks, dan kesesuaian informasi sebelum mempercayai atau membagikannya
Keamanan digital	Pemahaman dasar tentang kata sandi, OTP, tautan mencurigakan, data pribadi, dan modus penipuan
Transaksi digital	Pengalaman umum menggunakan marketplace, dompet digital, atau media sosial untuk pembelian dan promosi tanpa merekam detail transaksi personal
Kerentanan desain digital	Kemampuan mengenali penawaran mendesak, biaya tambahan, persetujuan otomatis, langganan tersembunyi, serta bentuk antarmuka manipulatif lainnya
Kapasitas produktif	Pemanfaatan media digital untuk promosi, katalog, komunikasi pelanggan, pembelajaran, dan pengembangan usaha
Kebutuhan pembelajaran	Materi, bentuk pelatihan, serta media pendampingan digital yang paling dibutuhkan warga

Data dianalisis secara deskriptif menggunakan frekuensi, proporsi, dan rangkuman tematik dari catatan observasi. Pelaporan hasil sebaiknya menggunakan kategori kelompok, misalnya “sebagian besar peserta”, “lebih dari setengah responden”, atau persentase kelompok bila jumlah responden dan data pencatatan tersedia. Artikel tidak perlu memuat nama responden, nomor telepon, alamat rinci, akun media sosial pribadi, rekaman percakapan, data finansial, ataupun informasi lain yang memungkinkan identifikasi individu.

2.5. Etika dan Perlindungan Subjek

Pengumpulan data dilakukan dengan prinsip sukarela, transparansi, minimalisasi data, dan perlindungan kerahasiaan. Sebelum observasi, wawancara ringan, atau pengisian instrumen, mahasiswa perlu menjelaskan tujuan kegiatan, jenis informasi yang dikumpulkan, bentuk penggunaan data dalam laporan/artikel, pihak yang memiliki akses terhadap data, serta hak warga untuk menolak atau menghentikan partisipasi tanpa konsekuensi. Prinsip ini sejalan dengan etika *Living Lab*, yang menuntut persetujuan berdasarkan informasi (*informed consent*), kebebasan berpartisipasi, dan hak peserta untuk menarik diri.

Dalam pelaksanaannya, persetujuan dapat diberikan secara tertulis pada lembar persetujuan singkat atau secara lisan yang didokumentasikan pada log kegiatan, sesuai tingkat risiko dan ketentuan kampus. Kegiatan yang melibatkan anak PAUD atau madrasah tidak menggunakan anak sebagai responden untuk pemetaan literasi digital tanpa persetujuan orang tua/wali. Data anak tidak dicantumkan dalam publikasi; dokumentasi foto atau video hanya digunakan setelah memperoleh persetujuan yang sesuai dari pihak berwenang dan orang tua/wali.

Seluruh proses juga harus mematuhi prinsip Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: data dikumpulkan secara spesifik, terbatas, sah, dan transparan; digunakan hanya untuk tujuan yang telah dijelaskan; serta dikelola secara aman dan bertanggung jawab. Data mentah disimpan secara terbatas oleh tim yang berwenang, dipisahkan dari identitas peserta bila identitas benar-benar diperlukan untuk administrasi, tidak dibagikan kepada pihak luar, dan dihapus atau dimusnahkan setelah tujuan pelaporan dan evaluasi selesai sesuai kebijakan institusi.

3. Hasil dan Pembahasan

Projek Intervensi Strategis (PIS) KKN Universitas Al Ghifari di Desa Cimekar disusun sebagai respons atas dua kerentanan yang telah dipetakan pada tahap awal, yaitu keterbatasan penguatan ekonomi produktif dan kebutuhan peningkatan ketahanan sosial digital. Implementasi program selama satu bulan tidak diarahkan sebagai kegiatan bantuan sesaat, melainkan sebagai proses pembelajaran lapangan (*Living Lab*) yang mempertemukan aset masyarakat, pengalaman pelaku usaha, jejaring sosial warga, dukungan pemerintahan desa, dan kompetensi mahasiswa. Dalam kerangka ABCD, kegiatan dimulai dari pengenalan kekuatan lokal bukan semata-mata daftar

kekurangan kemudian dilanjutkan dengan perancangan, pengujian, refleksi, dan penyesuaian intervensi secara kontekstual.

Berdasarkan program kerja, aset lokal yang berhasil diidentifikasi mencakup keberadaan pelaku UMKM, aktivitas Posyandu, PAUD dan madrasah, dukungan perangkat desa, kegiatan gotong royong, serta jejaring sosial warga RW 12. Pada aspek ekonomi, terdapat UMKM Sablon Badjoe, usaha keripik pisang, pengrajin gagang pacul, dan konveksi. Pada aspek sosial, keterlibatan mahasiswa dalam Posyandu, pengajaran PAUD dan madrasah, validasi data stunting, pendataan penerima MGB, gotong royong, serta wawancara penggunaan obat rasional dan herbal menunjukkan bahwa penguatan ekonomi dan literasi digital dilaksanakan di tengah jejaring layanan sosial yang telah hidup di masyarakat.

Data lapangan dari logbook Kelompok 33 menunjukkan bahwa kegiatan KKN yang terdokumentasi dilaksanakan pada tanggal 13–17 Juli 2026 di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, khususnya RW 12 dan PAUD Nurul Ihsan. Kelompok terdiri atas delapan mahasiswa, yaitu Annisa Aulia Safitri, Khaterine Febriani, Sandi Irawan, Kresna Lutfiansyah, Ade Hilman, Salma Nurzakia, Syafira Aulia, dan Ananda Salsabilla. Pada setiap kegiatan yang tercatat dalam logbook, seluruh anggota kelompok memperoleh tanda hadir “H”. Dengan demikian, data yang tersedia menunjukkan kehadiran lengkap delapan anggota kelompok pada kegiatan-kegiatan lapangan tersebut.

Pada 13 Juli 2026, kegiatan kelompok meliputi persiapan penempatan posko, pembuatan konsumsi untuk acara pembukaan desa, pelepasan KKN dari kampus, serta survei lapangan dengan mengunjungi PAUD dan berdiskusi dengan kepala sekolah. Catatan logbook menyebutkan bahwa mahasiswa memperoleh informasi mengenai beberapa potensi desa yang dapat dikembangkan serta melakukan koordinasi dengan pihak desa dan masyarakat terkait program kerja.

Pada 14 Juli 2026, seluruh anggota kelompok mengikuti kegiatan pembukaan KKN di Desa Cimekar, RW 12. Berdasarkan catatan logbook, pihak desa menyambut baik kegiatan KKN dan berharap terjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi tahap awal koordinasi antara mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat dalam pelaksanaan program KKN.

Pada 15 Juli 2026, kelompok berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu dan Posbindu. Bentuk partisipasi mahasiswa meliputi pencatatan hasil pengukuran pada KMS atau Buku KIA, pengukuran tekanan darah lansia, pendampingan balita, penyiapan dan perapian alat, registrasi peserta, pengisian buku hadir, pembagian konsumsi, pengukuran tinggi dan berat badan serta lingkaran kepala anak, dokumentasi, dan publikasi. Logbook mencatat bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan mahasiswa terhadap pelayanan, pemantauan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Pada 16 Juli 2026, kelompok melaksanakan kegiatan tontonan edukasi bertema “Area Pribadi Tubuhku” di PAUD Nurul Ihsan. Mahasiswa bertugas menghubungi pihak PAUD, memastikan jadwal, menyiapkan perlengkapan, membuka acara, memperkenalkan tim, menyiapkan laptop, proyektor, dan pengeras suara, mengondisikan anak-anak, memberikan penjelasan setelah pemutaran video, memperagakan gerakan, mendokumentasikan kegiatan, melakukan publikasi, serta membagikan hadiah. Berdasarkan catatan logbook, kegiatan tersebut ditujukan untuk membantu mengenalkan konsep area pribadi tubuh kepada anak-anak PAUD dan memberikan pengalaman belajar yang berkesan.

Pada 17 Juli 2026, kelompok mengikuti kegiatan kelas mengaji di Madrasah pada POS PAUD Nurul Ihsan. Mahasiswa menyimak kegiatan mengaji dan setoran hafalan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, serta membantu dokumentasi dan publikasi kegiatan. Catatan logbook menyebutkan bahwa kegiatan tersebut membantu mengefektifkan kegiatan membaca Al-Qur'an dan setoran hafalan serta mendukung penanaman akhlak, kedisiplinan, dan semangat belajar agama.

3.1. Pelaksanaan dan partisipasi kelompok

Pelaksanaan KKN Kelompok 33 di Desa Cimekar berlangsung melalui beberapa kegiatan lapangan yang tercatat dalam logbook pada tanggal 13–17 Juli 2026. Kelompok terdiri atas delapan mahasiswa, yaitu Annisa Aulia Safitri, Khaterine Febriani, Sandi Irawan, Kresna Lutfiansyah, Ade Hilman, Salma Nurzakia, Syafira Aulia, dan Ananda

Salsabila. Pada setiap kegiatan yang tercatat, seluruh anggota memperoleh status hadir sehingga tingkat kehadiran kelompok pada kegiatan tersebut tercatat lengkap berdasarkan logbook.

Partisipasi mahasiswa tidak hanya berupa kehadiran, tetapi juga pembagian tugas sesuai kebutuhan kegiatan. Tugas tersebut mencakup koordinasi dengan perangkat desa dan lembaga pendidikan, survei lapangan, administrasi kegiatan, pelayanan pada Posyandu dan Posbindu, pendampingan anak, pengajaran keagamaan, penyiapan perlengkapan, dokumentasi, publikasi, serta pengondisian peserta. Pola pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa kegiatan KKN dilaksanakan secara kolaboratif dengan memanfaatkan kompetensi dan peran setiap anggota kelompok.

3.2. Pemetaan awal dan koordinasi desa

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui persiapan penempatan posko, pelepasan KKN, survei lapangan, kunjungan ke PAUD, diskusi dengan kepala sekolah, serta pembukaan KKN bersama pihak Desa Cimekar. Pada kegiatan tanggal 13 Juli 2026, mahasiswa mencatat adanya beberapa potensi desa yang dapat dikembangkan. Selain itu, kelompok melakukan koordinasi dengan pihak desa dan masyarakat terkait program kerja.

Pembukaan KKN pada 14 Juli 2026 di RW 12 menjadi tahap penting dalam membangun legitimasi dan hubungan kerja dengan masyarakat. Catatan logbook menyatakan bahwa pihak desa menyambut baik kegiatan KKN dan berharap terjalin kerja sama yang baik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa implementasi program memperoleh penerimaan awal dari pihak desa, meskipun logbook belum menyediakan ukuran kuantitatif mengenai tingkat penerimaan atau jumlah warga yang terlibat.

3.3. Kegiatan kesehatan masyarakat

Keterlibatan kelompok dalam Posyandu dan Posbindu pada 15 Juli 2026 memperlihatkan bahwa pelaksanaan KKN terhubung dengan layanan sosial dan kesehatan masyarakat yang telah berjalan di Desa Cimekar. Mahasiswa mendukung kegiatan melalui pencatatan hasil pengukuran pada KMS atau Buku KIA, pengukuran tekanan darah lansia, pengukuran tinggi dan berat badan serta lingkaran kepala anak, pendampingan balita, registrasi peserta, pengisian daftar hadir, pembagian konsumsi, penyiapan alat, serta dokumentasi.

Kegiatan tersebut menunjukkan bentuk pemanfaatan aset kelembagaan masyarakat melalui kerja sama dengan kegiatan Posyandu dan Posbindu. Namun, logbook yang tersedia hanya mendokumentasikan bentuk kontribusi mahasiswa dan tidak mencantumkan jumlah peserta, jumlah balita yang diukur, jumlah lansia yang diperiksa, maupun hasil pengukuran kesehatan. Oleh sebab itu, pembahasan tidak dapat digunakan untuk menyatakan perubahan status kesehatan masyarakat.

3.4. Edukasi anak usia dini

Kegiatan edukasi “Area Pribadi Tubuhku” di PAUD Nurul Ihsan dilaksanakan pada 16 Juli 2026 melalui pemutaran video, penjelasan singkat, peragaan gerakan, dan pemberian hadiah. Mahasiswa juga bertanggung jawab atas koordinasi dengan pihak PAUD, penyiapan perlengkapan, pengondisian anak-anak, dokumentasi, dan publikasi.

Berdasarkan catatan logbook, kegiatan tersebut memberikan pengalaman belajar yang berkesan dan membantu mengenalkan konsep area pribadi tubuh kepada anak-anak PAUD. Pernyataan tersebut merupakan luaran berdasarkan catatan kegiatan dan observasi pelaksana. Karena tidak terdapat lembar evaluasi atau pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan, hasil tersebut belum dapat ditafsirkan sebagai peningkatan pengetahuan anak secara terukur.

3.5. Pendampingan kegiatan keagamaan

Pada 17 Juli 2026, kelompok berpartisipasi dalam kegiatan kelas mengaji di POS PAUD Nurul Ihsan. Mahasiswa menyimak kegiatan mengaji dan setoran hafalan anak-anak dari beberapa jenjang kelas, serta membantu dokumentasi dan publikasi kegiatan.

Logbook mencatat bahwa kehadiran mahasiswa membantu mengefektifkan kegiatan membaca Al-Qur'an dan setoran hafalan serta mendukung penanaman akhlak, kedisiplinan, dan semangat belajar agama. Temuan tersebut menunjukkan adanya kontribusi pendampingan pada kegiatan pendidikan keagamaan masyarakat. Akan tetapi, karena tidak tersedia data jumlah anak, frekuensi setoran hafalan, atau hasil evaluasi pembelajaran, kegiatan ini dilaporkan sebagai bentuk dukungan proses, bukan sebagai bukti peningkatan capaian belajar secara kuantitatif.

3.6. Keterkaitan dengan program pemberdayaan

Data logbook menunjukkan bahwa pelaksanaan KKN tidak hanya berupa kegiatan penyuluhan, tetapi juga mencakup proses pengenalan lokasi, koordinasi dengan pihak desa, kunjungan ke lembaga pendidikan, dukungan pada layanan kesehatan, edukasi anak, dan pendampingan kegiatan keagamaan. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa kelompok berupaya memanfaatkan aset kelembagaan yang telah ada di masyarakat, seperti pemerintah desa, PAUD, Posyandu, Posbindu, dan madrasah.

Secara metodologis, hasil dalam bagian ini harus dipahami sebagai hasil implementasi dan luaran awal. Berdasarkan logbook, data yang tersedia terutama memuat tanggal kegiatan, lokasi, bentuk kegiatan, pembagian tugas, kehadiran mahasiswa, dan catatan pelaksanaan. Dokumen yang tersedia belum memuat data kuantitatif mengenai jumlah peserta masyarakat pada setiap kegiatan, nilai *baseline–endline*, omzet, jumlah pesanan, jumlah unggahan media sosial, maupun intensitas penggunaan media digital sebelum dan sesudah program. Oleh sebab itu, pembahasan tidak mengklaim peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, penurunan penggunaan gawai bermasalah, atau peningkatan literasi digital secara statistik.

Data lapangan yang dapat diverifikasi menunjukkan terlaksananya persiapan dan penempatan posko, pembukaan KKN, survei awal ke PAUD, keterlibatan dalam Posyandu dan Posbindu, edukasi “Area Pribadi Tubuhku”, serta pendampingan kelas mengaji. Data tersebut memperkuat uraian mengenai proses implementasi dan partisipasi kelompok, tetapi belum cukup untuk membuktikan perubahan pendapatan, pengetahuan, kesehatan, atau perilaku masyarakat secara kuantitatif.

3.7 Resolusi Pemberdayaan Ekonomi dan Inovasi Desa

Pemetaan aset dan penetapan mitra

Pemetaan aset kolektif pada tahap awal menunjukkan bahwa RW 12 Desa Cimekar memiliki modal ekonomi berbasis keterampilan produksi dan jaringan sosial lokal. Kunjungan lapangan dilakukan pada beberapa unit usaha yang telah disurvei dan dipilih, yaitu Sablon Badjoe, usaha keripik pisang, pengrajin gagang pacul, dan konveksi. Keberagaman tersebut memperlihatkan bahwa desa tidak memulai pengembangan ekonomi dari kondisi tanpa potensi; sebaliknya, telah terdapat pengetahuan produksi, tenaga kerja, produk yang dapat dipasarkan, serta relasi ekonomi yang dapat dikembangkan.

Dari beberapa aset produktif tersebut, UMKM Sablon Badjoe dipilih sebagai Kelompok Mitra Produktif prioritas. Pertimbangan pemilihan mitra didasarkan pada adanya kualitas produk yang baik dan permintaan pesanan yang telah terbentuk. Namun, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemasaran usaha masih bertumpu pada relasi personal dan promosi dari mulut ke mulut. Mitra belum memiliki media digital yang berfungsi sebagai pusat informasi produk, promosi, maupun mekanisme awal penerimaan pesanan. Dengan kata lain, hambatan utama yang direspons PIS bukan terletak pada ketiadaan produk, tetapi pada belum optimalnya pengelolaan informasi usaha dan akses pasar digital.

Pemilihan fokus pada Sablon Badjoe merupakan bentuk kalibrasi intervensi terhadap waktu pelaksanaan KKN yang terbatas. Dalam siklus *Living Lab*, mahasiswa tidak menargetkan transformasi seluruh ekosistem UMKM desa dalam satu bulan, tetapi memilih masalah yang dapat ditangani secara realistis, dapat diuji, dan memiliki peluang keberlanjutan. Fokus tersebut juga sesuai dengan prinsip ABCD yang menghubungkan aset yang telah ada—kualitas produk, pengalaman produksi, permintaan pelanggan, dan relasi sosial mitra—dengan aset pengetahuan mahasiswa dalam desain informasi, pemanfaatan Instagram, dan pengembangan website katalog. Pendekatan ABCD secara umum menekankan mobilisasi kemampuan individu dan komunitas sebagai dasar pembangunan yang digerakkan masyarakat.

Kalibrasi kapasitas manajerial dan pemasaran

Intervensi ekonomi produktif difokuskan pada penguatan kapasitas manajerial dasar dalam pemasaran digital. Kapasitas manajerial pada konteks UMKM tidak dibatasi pada pencatatan keuangan atau struktur organisasi formal, tetapi mencakup kemampuan mengelola identitas usaha, informasi produk, materi promosi, komunikasi pelanggan, dan kanal pemesanan. Bagi usaha yang sebelumnya mengandalkan promosi lisan, keberadaan katalog digital dapat membantu memastikan informasi produk tersedia secara lebih konsisten, mudah ditelusuri, dan dapat dibagikan kembali kepada calon pelanggan.

Pendampingan dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu optimalisasi Instagram dan pembuatan website katalog. Instagram digunakan sebagai kanal promosi yang memungkinkan produk, proses produksi, contoh hasil sablon, dan informasi kontak ditampilkan secara visual dan diperbarui secara berkala. Website katalog dikembangkan sebagai media informasi yang lebih terpusat untuk memuat profil usaha, jenis layanan, produk atau portofolio, serta saluran komunikasi pemesanan. Dokumen program kerja mencatat adanya luaran website katalog Sablon Badjoe yang dapat digunakan sebagai media informasi dan promosi digital.

Penggunaan media sosial dan e-katalog relevan untuk UMKM karena keduanya melengkapi fungsi yang berbeda. Media sosial berperan dalam membangun jangkauan dan interaksi, sedangkan katalog digital membantu calon pelanggan melihat pilihan produk secara lebih sistematis. Berbagai praktik pengabdian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial, e-katalog, dan website dapat memperkuat visibilitas produk, ketersediaan informasi, serta komunikasi daring dengan konsumen; akan tetapi, dampak terhadap pendapatan tetap perlu dibuktikan dengan data penjualan dan pemantauan pascaprogram.

Dimensi pemberdayaan	Kondisi sebelum pendampingan	Intervensi PIS	Luaran yang teridentifikasi	Indikator keberlanjutan yang disarankan
Identitas digital	Jejak digital usaha belum terstruktur	Penataan informasi dasar dan identitas UMKM	Kanal identitas usaha mulai tersedia	Profil usaha diperbarui secara berkala
Promosi produk	Mengandalkan relasi dan promosi lisan	Optimalisasi Instagram sebagai media promosi	Media promosi digital tersedia	Jumlah unggahan, jangkauan, dan interaksi
Katalog produk	Informasi produk belum terkonsolidasi	Pembuatan website katalog	Katalog digital usaha tersedia	Kelengkapan produk, harga, kontak, dan pembaruan portofolio
Komunikasi pelanggan	Informasi diberikan secara individual melalui jejaring terbatas	Penyediaan tautan katalog dan kanal komunikasi	Akses informasi calon pelanggan lebih mudah	Jumlah pertanyaan atau pesanan dari kanal digital
Akses pasar	Berbasis pelanggan sekitar dan relasi personal	Integrasi promosi Instagram dengan katalog website	Peluang jangkauan pasar lebih luas	Asal pelanggan dan jumlah prospek baru
Kemandirian mitra	Pengelolaan digital belum menjadi praktik rutin	Pendampingan penggunaan kanal digital dasar	Dasar keterampilan pengelolaan media digital	Kemampuan mitra mengunggah dan memperbarui konten mandiri

Tabel tersebut menunjukkan bahwa resolusi ekonomi yang dicapai pada tahap KKN adalah pembentukan infrastruktur pemasaran digital dan peningkatan kesiapan manajerial dasar, bukan klaim peningkatan kinerja finansial secara langsung. Infrastruktur digital hanya menjadi produktif apabila dikelola secara konsisten. Karena itu, ukuran keberhasilan pascakegiatan harus mencakup bukan hanya keberadaan akun atau website, tetapi juga keterisian katalog, konsistensi pembaruan konten, respons terhadap pelanggan, dan penggunaan kanal digital dalam alur pemesanan nyata.

Rantai perubahan ekonomi produktif

Secara substantif, mekanisme perubahan yang diharapkan dari intervensi dapat dijelaskan melalui rantai berikut:

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13578>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Aset produk dan keterampilan lokal → identitas digital dan katalog → informasi produk lebih mudah diakses
→ peluang interaksi pelanggan meningkat → potensi perluasan pasar dan pendapatan

Rantai perubahan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperpendek jarak informasi antara pelaku usaha dan calon konsumen.

Sebelum pendampingan, calon pelanggan potensial perlu memperoleh informasi melalui relasi langsung atau rekomendasi dari orang lain. Setelah tersedia media promosi dan katalog, informasi dapat disebarkan melalui tautan atau unggahan visual, sehingga akses terhadap portofolio produk menjadi lebih terbuka. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mendukung penciptaan basis pelanggan yang lebih beragam apabila didukung kualitas pelayanan, pengelolaan pesanan, serta kapasitas produksi yang memadai.

Akan tetapi, terdapat beberapa batasan implementasi. Pertama, durasi satu bulan belum cukup untuk mengukur stabilitas pertumbuhan transaksi atau pendapatan. Kedua, tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan dan waktu yang sama untuk memproduksi konten secara rutin. Ketiga, visibilitas media sosial dipengaruhi algoritma platform yang berada di luar kendali mitra. Keempat, keberadaan katalog belum menjamin keputusan pembelian karena konsumen masih mempertimbangkan harga, kualitas, ongkos kirim, testimoni, dan kecepatan respons. Oleh karena itu, artikel perlu menghindari narasi deterministik bahwa website atau Instagram secara otomatis meningkatkan kesejahteraan.

Untuk memperkuat dampak pascakegiatan, mitra dapat menggunakan rencana operasional sederhana: membuat kalender unggahan mingguan, mendokumentasikan hasil produksi secara konsisten, mencantumkan kontak dan prosedur pemesanan yang jelas, merespons pertanyaan pelanggan, dan mencatat asal setiap pesanan. Jika memungkinkan, mitra juga dapat menyusun format pencatatan sederhana yang memuat tanggal pesanan, jenis produk, kanal asal pelanggan, nilai transaksi, serta status penyelesaian. Catatan tersebut memungkinkan evaluasi yang lebih objektif terkait kontribusi kanal digital terhadap aktivitas usaha.

Keterhubungan dengan pengentasan kemiskinan

Kaitannya dengan mandat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem perlu ditulis secara proporsional. Pendampingan satu UMKM tidak dapat diklaim sebagai penghapusan kemiskinan ekstrem pada tingkat desa. Akan tetapi, kegiatan ini dapat diposisikan sebagai kontribusi mikro terhadap strategi peningkatan pendapatan melalui penguatan kapasitas usaha produktif, perluasan akses informasi pasar, dan pengurangan ketergantungan pada mekanisme pemasaran yang sangat terbatas. Inpres Nomor 8 Tahun 2025 menekankan optimalisasi pengentasan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem melalui langkah-langkah yang terkoordinasi, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan kantong kemiskinan.

Dengan demikian, nilai strategis PIS berada pada pembangunan kapasitas dan kesiapan pelaku usaha untuk mengakses peluang ekonomi digital secara lebih mandiri. Kontribusi KKN bersifat *enabling*: menyediakan pendampingan awal, luaran digital, dan transfer keterampilan dasar. Keberlanjutan dan dampak ekonominya memerlukan kepemilikan oleh mitra, dukungan pemerintah desa, serta kemungkinan pendampingan lanjutan dari kampus atau pihak terkait.

3.8 Resolusi Sosial dan Perlindungan Literasi Digital

Kerentanan sosial digital sebagai konteks intervensi

Transformasi digital menghadirkan peluang baru bagi masyarakat Desa Cimekar, termasuk untuk promosi UMKM, komunikasi, pembelajaran, dan akses layanan. Namun, perkembangan tersebut juga membentuk risiko baru ketika kecakapan menggunakan teknologi tidak tumbuh seiring dengan intensitas penggunaan perangkat dan aplikasi. Dalam konteks PIS, risiko tersebut mencakup paparan informasi tidak terverifikasi, penipuan berbasis tautan atau akun palsu, penyalahgunaan data pribadi, transaksi impulsif, serta penggunaan gawai yang tidak terkelola pada anak dan remaja.

Kerentanan digital tidak boleh disederhanakan sebagai ketidakmampuan warga menggunakan aplikasi. Seseorang dapat mengoperasikan perangkat dan tetap rentan ketika tidak mampu memeriksa kredibilitas informasi,

membedakan iklan dan konten organik, memahami syarat transaksi, atau menolak desain aplikasi yang dibuat untuk mempercepat keputusan. Oleh sebab itu, fokus program “Saring Sebelum Sharing” diarahkan pada pembentukan kebiasaan berhenti sejenak, memeriksa, mempertimbangkan, dan baru kemudian membagikan atau mengambil keputusan.

Dalam pembahasan ini, ketahanan sosial digital didefinisikan sebagai kemampuan individu, keluarga, dan komunitas untuk menggunakan teknologi secara aman, kritis, produktif, dan bertanggung jawab; termasuk kemampuan saling mengingatkan ketika terdapat risiko informasi atau transaksi. Definisi ini menghubungkan literasi informasi, keamanan digital, perlindungan konsumen, serta pola pengasuhan digital. Dengan demikian, ketahanan sosial digital bukan hanya kapasitas individual, tetapi juga praktik sosial yang diperkuat melalui komunikasi keluarga, dukungan warga, dan norma komunitas.

Lokakarya pengasuhan digital

Pelaksanaan kegiatan sosial digital dapat diintegrasikan dengan pertemuan warga, aktivitas PAUD, madrasah, Posyandu, atau forum komunitas yang telah tersedia. Penggunaan ruang sosial yang sudah hidup merupakan strategi ABCD karena memanfaatkan aset kelembagaan lokal, tidak menciptakan forum baru yang sulit dipertahankan, dan membuka peluang keterlibatan orang tua atau pengasuh. Dalam dokumen program kerja, mahasiswa terlibat secara rutin dalam pengajaran PAUD dan madrasah, kegiatan Posyandu, serta aktivitas sosial warga. Keterlibatan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun komunikasi mengenai penggunaan gawai dan perlindungan anak di ruang digital.

Materi *digital parenting* tidak seharusnya dibingkai sebagai larangan total terhadap teknologi. Pengasuhan digital yang efektif lebih menekankan keseimbangan antara batasan yang jelas, pendampingan aktif, keteladanan orang tua, dan dialog sesuai usia anak. Orang tua atau pengasuh dapat didorong untuk menyepakati waktu penggunaan, menentukan ruang bebas gawai seperti waktu makan dan waktu belajar, memeriksa kesesuaian konten, serta membangun kebiasaan anak untuk bercerita apabila menemukan konten, permainan, atau pesan yang membuat tidak nyaman.

Riset tentang pengasuhan digital menunjukkan bahwa dampak berbagai strategi pengasuhan tidak selalu seragam, sehingga pendekatan yang terlalu sederhana misalnya hanya membatasi waktu layar tidak cukup. Mediasi yang aktif dan komunikasi orang tua-anak memiliki peran penting, sedangkan pola mediasi yang tidak konsisten berhubungan dengan konsekuensi penggunaan telepon pintar yang bermasalah. Karena itu, lokakarya sebaiknya berfokus pada kemampuan keluarga membuat aturan yang realistis, dipahami bersama, serta dapat diterapkan secara konsisten.

Komponen lokakarya	Materi inti	Praktik atau luaran yang diharapkan
Kesadaran pola penggunaan	Mengenali tujuan penggunaan gawai: belajar, komunikasi, hiburan, atau belanja	Keluarga mengenali kebiasaan penggunaan gawai di rumah
Kesepakatan keluarga	Pengaturan waktu, tempat, dan situasi penggunaan perangkat	Rancangan aturan keluarga yang sederhana dan realistis
Pendampingan aktif	Diskusi konten, pemilihan aplikasi, dan komunikasi terbuka	Orang tua mendampingi, bukan hanya mengawasi dari jauh
Perlindungan anak	Privasi, kontak asing, perundungan siber, konten tidak sesuai usia	Anak mengetahui kepada siapa harus meminta pertolongan
Pengelolaan penggunaan bermasalah	Tanda penggunaan berlebihan, gangguan tidur, konflik, atau pengabaian aktivitas lain	Pengasuh memiliki strategi respons awal dan rujukan bila diperlukan
Keteladanan orang dewasa	Kebiasaan orang tua menggunakan gawai saat berinteraksi dengan anak	Komitmen keluarga terhadap waktu dan ruang bebas gawai

Terkait anak usia dini, rekomendasi kesehatan dan perkembangan umumnya menekankan pembatasan paparan layar, kualitas konten, pendampingan orang dewasa, serta ketersediaan kegiatan alternatif seperti bermain aktif, membaca, dan interaksi langsung.

Tinjauan rekomendasi internasional menyebutkan bahwa untuk anak usia sangat dini, penggunaan layar perlu sangat dibatasi dan digantikan dengan interaksi pengasuh; bagi anak yang lebih besar, orang tua disarankan menyusun rencana media keluarga, menetapkan zona bebas layar, mendampingi penggunaan, dan memberikan alternatif aktivitas di luar perangkat. Rekomendasi tersebut dapat menjadi referensi, tetapi penerapannya harus menyesuaikan usia anak, konteks keluarga, kebutuhan pembelajaran, dan kesepakatan bersama.

Program penguatan ketahanan sosial digital

Selain pengasuhan digital, program ketahanan sosial digital diarahkan pada penguatan kemampuan warga dalam menghadapi arus informasi dan transaksi daring. Implementasi program “Saring Sebelum Sharing” secara prinsip dapat dibangun melalui tiga keterampilan inti: verifikasi informasi, perlindungan data pribadi, dan pengambilan keputusan transaksi yang sadar. Ketiga keterampilan ini penting karena informasi palsu dan penawaran manipulatif sering menggunakan kecepatan, rasa takut, atau dorongan emosional untuk membuat pengguna bertindak tanpa pemeriksaan yang cukup.

Keterampilan verifikasi informasi dapat diperkenalkan melalui pertanyaan sederhana: siapa sumber informasi ini, kapan informasi diterbitkan, apakah judul sesuai dengan isi, adakah sumber pembandingan yang kredibel, dan apakah pesan meminta pengguna segera membagikan informasi? Kebiasaan tersebut penting terutama bagi masyarakat yang menggunakan grup percakapan sebagai sumber informasi sehari-hari. Tujuannya bukan membuat warga selalu curiga, melainkan membangun kemampuan untuk membedakan informasi yang perlu diteruskan, diperiksa, atau dihentikan penyebarannya.

Pada dimensi keamanan data, peserta perlu memahami bahwa OTP, PIN, kata sandi, kode verifikasi, dan data identitas tertentu tidak boleh diberikan kepada pihak lain, termasuk kepada pihak yang mengaku sebagai layanan resmi. Prinsip sederhananya adalah “verifikasi melalui kanal resmi, jangan bertindak karena pesan mendesak, dan jangan membagikan kredensial keamanan.” Materi ini dapat dipraktikkan melalui simulasi pesan hadiah palsu, tautan diskon, atau panggilan yang mengatasnamakan institusi tertentu.

Selanjutnya, penguatan literasi transaksi perlu membahas risiko arsitektur aplikasi manipulatif atau *dark patterns*. *Dark patterns* adalah desain antarmuka digital yang berupaya mengarahkan, mengecoh, atau melemahkan otonomi pengguna ketika memilih.

Bentuknya dapat berupa hitung mundur palsu, pesan “stok hampir habis”, tombol menolak yang sulit ditemukan, biaya yang muncul belakangan, persetujuan otomatis atas langganan, atau tampilan yang menonjolkan pilihan tertentu secara tidak seimbang. *Dark patterns* dapat menurunkan kualitas keputusan konsumen karena pengguna terdorong menyetujui pilihan yang belum dipahami seluruh konsekuensinya.

Risiko digital	Ciri yang dapat dikenali warga	Respons otonom yang dilatih
Informasi palsu	Judul sensasional, sumber tidak jelas, ajakan segera menyebarkan	Periksa sumber, tanggal, isi, dan pembandingan sebelum membagikan
Tautan atau akun palsu	Tautan tidak lazim, akun baru, iming-iming hadiah atau ancaman	Jangan klik terburu-buru; akses layanan melalui aplikasi atau situs resmi
Pencurian kredensial	Permintaan OTP, PIN, kata sandi, atau kode verifikasi	Tolak permintaan, amankan akun, dan hubungi kanal resmi
Urgensi manipulatif	Hitung mundur, “stok tinggal sedikit”, atau tekanan membeli cepat	Tunda keputusan dan bandingkan kebutuhan, harga, serta syarat
Biaya tersembunyi	Total pembayaran berubah di tahap akhir	Periksa seluruh rincian harga, biaya layanan, pengiriman, dan pajak
Langganan tersembunyi	Persetujuan otomatis atau pembatalan yang sulit ditemukan	Baca syarat, cari opsi pembatalan, dan simpan bukti transaksi
Penggunaan gawai bermasalah	Mengganggu tidur, belajar, hubungan keluarga, atau aktivitas harian	Terapkan kesepakatan keluarga dan aktivitas alternatif di luar layar

Eskalasi otonomi kognitif

Sasaran utama program bukan hanya pengetahuan deklaratif misalnya peserta mampu menyebutkan arti OTP atau hoaks melainkan eskalasi otonomi kognitif. Otonomi kognitif adalah kapasitas warga untuk memahami bahwa pilihan digital dapat dipengaruhi oleh desain, emosi, atau tekanan waktu; kemudian mengambil jeda, mencari bukti, membandingkan pilihan, dan menentukan tindakan sesuai kepentingannya sendiri. Dengan kata lain, warga tidak semata menjadi pengguna aplikasi, tetapi menjadi pengambil keputusan yang sadar dalam ruang digital.

Secara operasional, eskalasi tersebut dapat dijelaskan dalam empat tingkat berikut.

Tingkat	Karakteristik	Indikator evaluasi
Reaktif	Pengguna segera mengklik, membagikan, atau membeli berdasarkan pesan yang diterima	Keputusan didominasi urgensi, hadiah, atau rasa takut
Sadar risiko	Pengguna mengetahui bahwa hoaks, penipuan, dan manipulasi dapat terjadi	Mampu menyebutkan contoh risiko digital
Kritis-verifikatif	Pengguna memeriksa sumber, syarat, biaya, dan kanal resmi sebelum bertindak	Berhasil menjawab studi kasus atau simulasi
Otonom-protektif	Pengguna dapat menunda keputusan, menolak desain manipulatif, dan melindungi data diri/keluarga	Mempraktikkan langkah cek, tunda, bandingkan, dan putusan

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui observasi fasilitator, catatan diskusi, dokumentasi, dan refleksi peserta selama pelaksanaan program. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan OTP, PIN, kata sandi, dan data pribadi; memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya; serta membaca rincian biaya dan ketentuan sebelum melakukan transaksi digital. Dokumentasi dan catatan pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya penguatan ketahanan sosial digital masyarakat. Namun, perubahan kapasitas peserta belum diukur menggunakan instrumen kuantitatif pra-pasca sehingga hasil kegiatan diposisikan sebagai luaran proses dan edukasi awal.

Integrasi resolusi ekonomi dan sosial

Dua resolusi PIS memiliki relasi langsung. Di satu sisi, digitalisasi UMKM membantu Sablon Badjoe membangun kanal promosi dan katalog yang lebih mudah diakses calon pelanggan. Di sisi lain, peningkatan aktivitas digital perlu disertai kemampuan masyarakat untuk menjaga keamanan data, menyusun komunikasi usaha yang transparan, dan menghindari pola transaksi yang merugikan. Pelaku UMKM yang menggunakan media sosial juga perlu memahami etika informasi produk, seperti mencantumkan deskripsi yang jelas, tidak membuat klaim menyesatkan, menyampaikan harga dan ketentuan secara transparan, serta merespons pelanggan melalui kanal yang dapat diverifikasi.

Integrasi ini mendukung konsep ekonomi digital yang produktif sekaligus aman. Literasi digital tidak berhenti pada kemampuan membuat unggahan promosi, melainkan mencakup literasi keamanan, literasi informasi, literasi konsumen, dan kemampuan mengelola identitas digital usaha.

Dengan demikian, program tidak hanya membekali mitra untuk “masuk ke ruang digital”, tetapi juga untuk beraktivitas di ruang tersebut secara bertanggung jawab dan lebih tahan terhadap risiko eksploitasi.

Secara keseluruhan, hasil implementasi PIS memperlihatkan bahwa Desa Cimekar memiliki aset sosial dan ekonomi yang dapat dimobilisasi melalui pendekatan ABCD. Pada dimensi ekonomi, luaran utama berupa inisiasi identitas digital, optimalisasi Instagram, dan website katalog UMKM Sablon Badjoe. Pada dimensi sosial, program “Saring Sebelum Sharing” memberikan kerangka penguatan literasi informasi, keamanan transaksi, pengasuhan digital, dan pengambilan keputusan yang lebih otonom. Keberhasilan lanjutan program bergantung pada konsistensi pengelolaan kanal digital oleh mitra, penguatan peran keluarga dalam pendampingan anak, serta dukungan komunitas dan pemerintah desa untuk memastikan kegiatan tidak berhenti setelah periode KKN.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan KKN berbasis Asset-Based Community Development (ABCD) di RW 12 Desa Cimekar menunjukkan bahwa aset ekonomi dan sosial yang telah tersedia di masyarakat dapat dimobilisasi melalui intervensi digital yang kontekstual. Proyek Intervensi Strategis (PIS) menghasilkan luaran awal berupa penguatan identitas digital UMKM Sablon Badjoe melalui optimalisasi Instagram dan penyediaan website katalog sebagai media informasi dan promosi, serta penguatan ketahanan sosial digital melalui program “Saring Sebelum Sharing” yang menekankan verifikasi informasi, perlindungan data pribadi, kehati-hatian dalam transaksi digital, dan pengambilan keputusan yang lebih sadar. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam Posyandu, PAUD, madrasah, perangkat desa, dan kegiatan sosial menunjukkan adanya pemanfaatan aset kelembagaan masyarakat sebagai ruang pendukung keberlanjutan program. Meskipun demikian, pelaksanaan selama satu bulan belum memadai untuk membuktikan peningkatan omzet, pengurangan kemiskinan, peningkatan literasi digital, maupun perubahan perilaku masyarakat secara statistik karena belum tersedia data pra-pasca dan indikator kuantitatif yang memadai. Oleh karena itu, hasil kegiatan perlu diposisikan sebagai luaran awal dan fondasi pemberdayaan yang memerlukan keberlanjutan melalui pengelolaan kanal digital UMKM secara konsisten, penguatan edukasi keluarga dan komunitas, serta dukungan pemerintah desa dan pendampingan lanjutan dari perguruan tinggi. Sebagai tindak lanjut, model “Desa Cimekar Tangguh Digital dan Produktif” dapat dikembangkan melalui Pojok UMKM Digital, Kelas Keluarga Tangguh Digital, Posko Cek Informasi dan Transaksi Aman, serta pemantauan indikator agregat desa sehingga hasil KKN dapat berkembang dari kegiatan pengabdian jangka pendek menjadi model

Reference

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316745/inpres-no-8-tahun-2025>
2. Brignull, H., Miquel, M., Rosenberg, J., & Offer, J. (2022). Dark patterns: Conceptualization and future research directions. *Business & Information Systems Engineering*, 65, 1–16. <https://doi.org/10.1007/s12599-022-00783-7>
3. CIFOR-ICRAF. (n.d.). *Facilitating an asset-based community-driven development process*. <https://www.cifor-icraf.org/publications/downloads/Publications/PDFS/MN20057.pdf>
4. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029*. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/987/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+digital+nomor+16+tahun+2025
5. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). *Menghadapi ancaman deepfake, Komdigi perkuat perlindungan masyarakat di ruang digital*. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9498>
6. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). *Komdigi melalui BPSDM Komdigi dukung Safer Internet Day 2026*. <https://bpsdm.komdigi.go.id/berita-komdigi-melalui-bpsdm-komdigi-dukung-safer-internet-day-2026-19-2341>
7. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (n.d.). *Makin cakap digital: Program literasi digital Indonesia*. <https://literasidigital.id/>
8. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem*. <https://jdih.pemberdayaan.go.id/storage/peraturan/dokumen/Inpres%20Nomor%208%20Tahun%202025.pdf>
9. Kristian, N. (2026). Pemberdayaan UMKM melalui pendekatan Asset-Based Community Development berbasis literasi bilingual dan digital marketing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://journal.unita.ac.id/index.php/PENGABDIAN/article/download/2016/996>
10. Narayanan, A., Mathur, A., Chetty, M., & Kshirsagar, M. (2020). Dark patterns: Past, present, and future. *ACM Queue*, 18(2), 67–92.
11. Nevmerzhijskaya, A. (2020). *Ethical considerations of living labs*. Theseus. <https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/346908/Nevmerzhijskaya.pdf>
12. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Dark commercial patterns*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/10/dark-commercial-patterns_9f6169cd/44f5e846-en.pdf
13. South, J., Coan, S., Woodward, J., Bagnall, A.-M., & Rippon, S. (2024). Asset-based community development: Co-designing an asset-based evaluation study for community research. *SAGE Open*, 14(2). <https://doi.org/10.1177/21582440241240836>
14. Tim KKN Universitas Al Ghifari Kelompok 33. (2026). *Program kerja KKN Tematik Berdampak Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung*.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). https://jdih.komdigi.go.id/index.php/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang+nomor+27+tahun+2022
16. Universitas Muhammadiyah Mataram. (2024). Digitalisasi produk BUMDes berbasis e-katalog sebagai strategi promosi yang berdaya saing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/26624>
17. Warren, J., & Lhatoo, S. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 13(5), 474–486. <https://doi.org/10.1080/0961452032000125857>
18. Zhang, Y., Zhang, S., & Liu, Y. (2023). Active parental mediation and adolescent problematic internet use: The role of psychological needs. *Frontiers in Psychology*, 14, Article 1197374. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10451844/>